



Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir (Studi di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar)

Aldy Pratama¹, Bahjatul Murtasidin², Novendra Hidayat³

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung

Email : aldirey68@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 23, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 26, 2025

Keywords:

Fishing Community, Role, Empowerment, Local Government

ABSTRACT

The fishing community is a community that lives, grows, and develops in coastal areas, namely a transition area between land and sea areas. Coastal area management including coordination, planning, utilization, supervision, and control of coastal resources is carried out by the government, especially the regional government. The regional government plays a role in empowering coastal communities in improving welfare and encouraging coastal community business activities through increasing capacity, providing access to technology and information, capital and infrastructure and other productive economic assets. Empowerment is a process that is attempted or a series of activities carried out in an effort to strengthen and optimize independence, in the sense of increasing the advantages and competitiveness of groups in society. Empowerment of coastal fishing communities is one of the efforts made by the Central Bangka regional government towards the Village Lubuk Besar which focuses on the fisheries sector. The purpose of this study is to describe the role of government in community empowerment and to determine the obstacles in implementing the empowerment program. This research method uses a descriptive qualitative approach that contains primary data sources from in-depth interviews with informants. This study took 6 informants with a purposive sampling technique for determining informants. This study uses Edi Soharto Empowerment of theory. The results of the study show The research findings show that the local government has made efforts to improve access to resources through the provision of fishing equipment and fuel subsidies; however, the distribution remains uneven. In terms of participation, the involvement of fishing communities in planning forums and institutional activities is still passive. Meanwhile, capacity-building programs such as training and mentoring are limited, unsustainable, and have not fully addressed the actual needs of the fishermen. While the obstacles are the lifestyle or habits of fishermen, 2) Insufficient human resources, 3) Inadequate budget.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 23, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 26, 2025

ABSTRAK

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut. Pengelolaan wilayah pesisir pantai termasuk pengkoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,



Kata Kunci :

Komunitas Nelayan, Peran, Pemberdayaan, Pemerintah Daerah

dan pengendalian sumberdaya pesisir dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan dalam memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan dan infrastruktur dan aset ekonomi produktif lainnya. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang diupayakan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan, dalam artian yaitu keunggulan dan kemampuan bersaing kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Bangka Tengah terhadap Desa Lubuk Besar yang berfokus pada bidang perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang terdapat sumber data primer dari wawancara mendalam dengan informan. Penelitian ini mengambil informan sebanyak 6 orang dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan dari Edi Suharto. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya membuka akses terhadap sumber daya melalui pemberian alat tangkap dan subsidi BBM, namun distribusinya belum merata. Dalam hal partisipasi, keterlibatan masyarakat nelayan dalam forum perencanaan dan kelembagaan masih bersifat pasif. Sementara itu, program peningkatan kapasitas seperti pelatihan dan pendampingan masih terbatas, tidak berkelanjutan, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nelayan. Sedangkan hambatannya yaitu 1) Pola hidup atau kebiasaan nelayan, 2) Sumber daya manusia yang kurang mumpuni, 3) Anggaran yang kurang memadai.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Aldy Pratama

Universitas Bangka Belitung

E-mail: aldirey68@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, sehingga menyimpan potensi sumber daya laut dan pesisir yang sangat melimpah (Bengen, 2001). Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berada di wilayah pesisir dan memiliki sumber daya kelautan yang begitu besar potensinya seharusnya mampu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya terutama yang bertempat tinggal di wilayah pesisir, terutama dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut yang sangat melimpah. Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda Pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara. Tanggung jawab yang sekaligus menjadi tujuan negara Indonesia itu sendiri sesuai dengan amanat Pancasila dan juga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana di dalamnya di tuliskan melindungi segenap



bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa indonesia.

Kekayaan alam yang ada di wilayah pesisir pantai sendiri merupakan kekayaan yang dikelola secara langsung oleh negara, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di sebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau pulau yang di lakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat, dan laut serta antar ilmu pengetahuan dan juga manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pasal 63 juga berbunyi “Pemerintah Dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan dan infrastruktur, jaminan pasar dan asset ekonomi produktif lainnya”.

Salah satu upaya dilakukan oleh Pemerintah yaitu melalui program program pemberdayaan kepada masyarakat pesisir dengan bidang fokusnya yakni bidang perikanan, hal ini dikarenakan sektor perikanan merupakan sektor yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang mendiami wilayah pesisir, serta sektor ini juga dapat berarti dan banyak hal dan perlu untuk di pertahankan agar terus kedepannya bisa adaptif dengan kondisi yang akan datang. Sehingga, usaha pemerintah seharusnya tidak hanya sebatas menyatukan usaha di bidang perikanan saja tetapi harus juga memperkuat masyarakat yang bekerja di sektor perikanan untuk menghadapi situasi dalam konteks sosial, kultural ekonomi dan ekologi dimana mereka berada (Chunpagdee dan Jentoft 2015).

Pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan, dalam artian yaitu ke unggulan dan kemampuan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses, maka pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup baik itu secara individu maupun kelompok dan masyarakat luas. Pemberdayaan menekankan bahwa setiap individu mendapatkan keterampilan, pengetahuan dan juga kekuatan yang cukup untuk bisa mempengaruhi kehidupannya menjadi lebih baik (Putra dan Ma'ruf 2021). Masyarakat pesisir dikategorikan sebagai "Sekumpulan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir umumnya menggantungkan mata pencaharian mereka pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Masyarakat pesisir terdiri dari pemberdaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan dan yang paling umum adalah nelayan. Umumnya masyarakat nelayan masih hidup dalam kemiskinan dan juga serba keterbatasan, keterbatasan nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan. Tetapi lebih terwujud dalam pada ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan.



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang secara geografis dikelilingi lautan dan selat. Potensi perikanan tangkap di provinsi Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Babel berdasarkan pembagian wilayah pengelolaan perikanan (WPP) termasuk dalam WPP Laut Cina Selatan. Sektor Kelautan dan Perikanan di Bangka Belitung terbilang cukup berperan terhadap perekonomian karena sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sehingga perlu adanya penerapan kebijakan yang tepat sehingga dapat mewujudkan tujuan serta dampak yang diinginkan secara bersama.

Kabupaten Bangka Tengah terletak di Pulau Bangka dengan luas wilayah sekitar 2.252,85 km² atau setara dengan 225.285,62 hektare. Wilayah ini terbagi ke dalam enam kecamatan, yaitu Koba, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, dan Lubuk Besar. Sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Tengah memiliki kawasan perairan yang potensial untuk dikembangkan. Hampir seluruh kecamatan di daerah ini memiliki wilayah pesisir. Sektor kelautan dan perikanan, baik yang bersumber dari kekayaan hayati maupun nonhayati, sangat penting untuk didorong pengembangannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan keberlangsungan hidup manusia.

Dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sektor perikanan, khususnya nelayan pesisir, memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat lokal serta penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat luas. Namun, nelayan pesisir seringkali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, teknologi, akses pasar, serta perubahan lingkungan yang berdampak pada hasil tangkapan mereka. Di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya di Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar, masyarakat nelayan pesisir masih menghadapi tantangan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Pemberdayaan ini tidak hanya meliputi peningkatan kapasitas dan keterampilan, tetapi juga akses terhadap sumber daya, dukungan kebijakan, dan fasilitasi program-program pemerintah yang relevan.

Selain itu masyarakat nelayan juga menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama jika cuaca sedang buruk atau gelombang laut sedang besar, perlu alternatif pekerjaan lain, akan tetapi nelayan tidak memiliki keterampilan lain sebagai nelayan yang mencari ikan. Selain itu, melakukan atau memulai pekerjaan lain seperti bertani dan berladang juga membutuhkan modal, sementara akses nelayan terhadap modal tidak ada. Dalam kondisi yang seperti ini maka masyarakat nelayan hanya bisa pasrah dengan keadaan yang terjadi. Berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Lubuk Besar pada umumnya bisa diatasi melalui pemberdayaan yang baik dan terukur, agar masyarakat nelayan lebih kuat dan memiliki kemandirian sosial, ekonomi dan politik dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat keberlanjutan.

Ada beberapa aspek yang menjadikan terpeliharanya kemiskinan masyarakat nelayan, yang diantaranya kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat menjadi objek, bukan subjek. Kondisi kebergantungan nelayan Desa Lubuk Besar



juga sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat nelayan, terkadang beberapa nelayan tidak bisa melaut di karenakan keadaan musim yang tidak menentu, disamping itu juga saat ini wilayah mata pencaharian nelayan sangat sulit hal ini dikarenakan nelayan harus menempuh perjalanan hingga puluhan mil ke tengah laut agar mendapatkan hasil yang cukup, keadaan ini juga harus di tolong oleh modal yang tidak sedikit sedangkan akses nelayan terhadap modal sangatlah minim. Hal ini yang membuat semakin sulit dan lambatnya perkembangan perekonomian masyarakat, disamping itu yang membuat minimnya kreatifitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan yang cukup melimpah adalah dikarenakan rendahnya sumberdaya manusia (SDM) dengan rata rata nelayan di Desa Lubuk Besar dusun lubuk laut hanya tamatan SD sampai SMP, akses terhadap modal juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan yang dimana ini sangat penting untuk menunjang usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh nelayan pesisir. Peralatan yang terbatas seperti dalam pemahaman akan teknologi yang menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan ikan, padahal keberadaan masyarakat nelayan sangat dibutuhkan oleh segala sektor karena ikan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang setiap saat diperlukan dimana nelayan juga berperan sebagai pelaku ekonomi lokal, terutama di kampung kampung nelayan dan desa desa pesisir, Nelayan sering menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Maka dari itu perlu penanganan dan perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk memberdayakan agar mereka dapat layak hidup layak serta kesehatan mereka terjamin. Ironisnya upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat, tetapi seringkali berdasarkan program program intervensi dari atas menghadapi kenyataan kondisi kehidupan nelayan yang seperti itu maka ada dua pilihan yang di lakukan masyarakat nelayan, yakni menyesuaikan diri dari kondisi lingkungan atau melakukan perlawanan dengan kekerasan, pilihan yang pertama tidak mungkin di lakukan mengingat kondisi kemiskinan yang di alami dan faktor pendidikan yang di miliki tidak mampu merespon setiap perubahan sosial ekonomi yang terjadi di sekitarnya.

Secara umum masalah masalah yang di hadapi masyarakat pesisir dapat di spesifikasi sebagai masalah dibidang pengetahuan dan keterampilan, permodalan, pengetahuan teknologi dan manajemen serta peranan Herry yulistiyono 2014 (dalam Nuryanto, 2017:3). Strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan masyarakat pesisir adalah membantu masyarakat pesisir agar dapat membangun dan berkembang atas kemampuan sendiri dengan mendasarkan pada pengembangan potensi alam dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan nelayan pesisir melalui kebijakan, program, dan sumber daya yang dapat diakses masyarakat. Peran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa bantuan dan intervensi yang dilakukan benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup nelayan dan keberlangsungan usaha mereka. Namun, masih perlu dikaji secara mendalam sejauh mana peran pemerintah daerah Bangka Tengah dalam menjalankan fungsi pemberdayaan tersebut, serta tantangan dan peluang yang ada di lapangan.

Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk pemahaman terhadap sistem nilai, kepercayaan, serta cara pandang masyarakat terhadap perubahan dan masa depan. Pola pikir masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas suatu program atau proyek pemberdayaan. Oleh karena itu, agar



masyarakat benar-benar terlibat dalam setiap tahapan perubahan, pendekatan komunikasi yang digunakan harus relevan, membumi, dan sesuai dengan karakter budaya lokal. Meskipun mendorong pemberdayaan masyarakat secara optimal bukanlah tugas yang mudah, namun suasana otonomi daerah dan keterbukaan politik yang berkembang saat ini memberi peluang dan harapan dalam meningkatkan kapasitas keberdayaan, khususnya bagi masyarakat di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar

Dalam uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik ingin pada penelitian yang berjudul “ Tinjauan Terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir (Studi Kasus: Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar))” menjadi pijakan awal dari sebuah penelaan lebih lanjut menuju sebuah pembangunan di daerah yang memeperhatikan kondisi sumber daya alam (SDA) dan juga sumber daya manusia (SDM) demi tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong, 2006). Kemudian, penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder dengan teknik penentuan informan yakni, *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Bangka Tengah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir di Lubuk Besar

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada dan di hadapi oleh setiap warga negara baik itu maju maupun berkembang, hal ini juga tidak lepas dari yang di hadapai oleh warga negara indonesia terlebih lagi yang mendiami wilayah wilayah pesisir pantai di seluruh indonesia. Kemiskinan umumnya muncul akibat lemahnya kapasitas individu serta kurangnya dukungan lingkungan dalam mengelola potensi alam dan sumber daya yang tersedia secara optimal. Menurut A. Soedijar (2003), kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan dimensi lainnya. Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kemiskinan seringkali ditandai dengan rendahnya pendapatan, ketimpangan distribusi pekerjaan, serta ketidakterlibatan sebagian masyarakat dalam proses pembangunan. Akibatnya, kelompok tersebut belum mampu menikmati manfaat pembangunan secara layak. Kondisi ini diperparah oleh sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja secara berlebih namun dengan tingkat produktivitas yang masih rendah.



Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan agar termasuk dalam kategori sejahtera merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Kurangnya informasi tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kurangnya keterampilan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya potensi sumber daya dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan sosialnya. Kondisi sosial budaya masyarakat tidak selamanya mendukung peningkatan potensi warganya, adakalanya malah menghambat kemajuan masyarakat itu sendiri. Di lain pihak keberadaan manusia, alam dan lingkungan sosial merupakan potensi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Minimnya pengetahuan terkait informasi dan juga cara penggunaan teknologi terkini juga menjadikan banyaknya masyarakat yang kurang mampu tidak dapat menjadikan teknologi sebagai penunjang pendapatan mereka, hal ini lah menjadikan masyarakat miskin akan selalu miskin, kemudian sumber daya manusia yang tidak teperdayakan secara baik juga menjadikan masyarakat akan selalu berada di lingkaran kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dengan jalan pemberian bantuan kebutuhan hidup seketika bukanlah upaya pemecahan masalah, namun hanya merupakan bantuan sementara. Kelengkapan penunjang yang diperlukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat meliputi sumber dana, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu dapat digali dan diperoleh dari pemerintah, instansi/lembaga non pemerintah dan masyarakat. Paradigma pembangunan yang berfokus pada kepentingan masyarakat menempatkan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat lokal diberikan hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk secara mandiri mengelola dan mengatur urusan daerahnya sesuai dengan inisiatif dan kebutuhan mereka.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan mendasar dalam struktur dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Perubahan ini menuntut adanya penataan yang sistematis terhadap elemen-elemen pemerintahan daerah. Reformasi tersebut diwujudkan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada pemerintah kabupaten/kota, yang berlandaskan pada asas desentralisasi. Otonomi tersebut diberikan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Pemberdayaan merupakan sebuah program yang harus di kedepankan guna meningkatkan sumberdaya manusia yang lebih baik agar nantinya masyarakat dapat mandiri baik dari aspek ekonomi maupun pemenuhan aspek sosial politik di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian, proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan lebih efektif seiring dengan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi ini tumbuh dari kesadaran kolektif untuk terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya pada tingkat lokal. Pemerintah berkewajiban secara terus menerus untuk memperdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaan sehingga pada gilirannya mereka dapat mampu untuk mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah oleh sebab itu pemberdayaan mampu mendorong masyarakat untuk terus tumbuh dan terciptanya kemakmuran di lingkungan masyarakat.



Fungsi pemerintah dalam kaitannya untuk pemberdayaan masyarakat yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Berdasarkan peran yang telah di utaran di atas pemerintah daerah bangka tengah memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di kecamatan lubuk besar desa lubuk besar melaksanakan pemberdayaan masyarakat terkhususnya nelayan pesisir. Peran itu dapat di lihat melalui program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah seperti pemberdayaan dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Pemerintah memfokuskan pemberdayaan masyarakat nelayan kecil yang mana alasannya dikarenakan sebagian besar nelayan kecil masih berada dalam kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah disini harus berperan sangat penting untuk turut hadir membantu, memperdayakan dan juga ikut dalam memberi pengetahuan agar nelayan nelayan kecil dapat keluar dari kemiskinan. Jika tidak kemiskinan tentunya akan terus ada dan kemelaratan terus merajalela yang merusak tatanan sosial di lingkungan hidup para nelayan kecil. Dalam konteks ini, pemberdayaan di artikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai keajahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Unsur-unsur kemandirian pada masyarakat dapat di tentukan oleh kemampuan ekonomi yang di miliki yang nantinya di harapkan dapat menciptakan tata kehidupan yang lebih baik.

Kemudian, peran yang di ambil oleh pemerintah Desa lubuk besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan adalah dengan membuka ruang dialog di forum musrembang dengan menyerap aduan aduan dari masyarakat dalam hal ini nelayan yang ada di desa lubuk besar. Meskipun dalam prakteknya masih banyak dari nelayan yang belum optimal dan cenderung diam dan hanya menjadi pendengar. Pemerintah desa dalam bentuk fasilitator antara pemerintah dengan masyarakat nelayan dengan menghubungkan program program yang telah berjalan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang telah di lakukan oleh dinas pemerintah kabupaten bangka tengah. Pemerintah Desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat sekitar kawasan wilayah pesisir dalam rangka memperdayakan enomoni masyarakat nelayan dalam upaya mencapai kesejahteraan. Dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan tempat mereka mencari rezeki. Kawasan perikanan sebagai sebuah sistem tidak dibatasi oleh batasan-batasan administratif, tetapi lebih pada skala ekonomi dan ekologi yang melingkupi kawasan tersebut sesuai dengan pola interaksi ekonomi dan ekologinya. Pengembangan kawasan ini memerlukan penataan ruang yang menyeluruh yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengelolaan dan penertiban kembali penataan ruang.

Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan juga memberikan rasa aman serta perlindungan bagi nelayan dalam menjalankan usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Seperti yang sesuai dalam amanat Undang Undang Dasar Nomor 7 tahun 2016 pemerintah daerah diwajibkan menjalankan penyelenggaraan bagi nelayan Lubuk besar di wilayah bangka tengah dapat di wujudkan melalui beberapa cara:

1. Penyediaan jaminan sosial nelayan
2. Bantuan alat tangkap



3. Penyuluhan dan pendampingan
4. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teologi dan Informasi
5. Kelembagaan Nelayan

Pertama, mengenai perlindungan jaminan sosial bagi nelayan. Nelayan kecil dan tradisional, yang umumnya beroperasi di wilayah terpencil dengan keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya, sebenarnya memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap produksi perikanan nasional. Namun demikian, mereka juga termasuk kelompok yang paling rentan terhadap fluktuasi harga, dampak perubahan iklim, serta berbagai tantangan lain yang memengaruhi penghidupan mereka. Perubahan kondisi lingkungan akibat krisis iklim turut meningkatkan risiko kecelakaan kerja saat melaut. Beberapa faktor yang memperbesar potensi kecelakaan di laut antara lain kondisi cuaca ekstrem seperti badai, angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Situasi tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau terbalikinya kapal, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan nelayan.

Oleh sebab itu, adanya sistem perlindungan sosial yang memadai menjadi sangat penting guna menjamin kesejahteraan nelayan serta menjaga keberlangsungan sumber penghidupan mereka. Bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui skema asuransi, program bantuan dari pemerintah, maupun berbagai inisiatif lainnya yang dirancang untuk membantu nelayan beserta keluarganya dalam menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang mereka hadapi..

Salah satu upaya pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bangka Tengah adalah program jaminan sosial nelayan. Seperti yang disampaikan oleh dinas perikanan Bangka Tengah kabid bidang perikanan tangkap bapak Triono Aries kurnia menyebut bahwa :

" Kami pemerintah dari dinas perikanan juga berupaya salah satunya adalah melalui program kami jaminan sosial nelayan di wilayah lubuk besar berkolaborasi dengan bpjs ketenagakerjaan yang dimana ini merupakan salah satu di upayakan menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi nelayan "
(Wawancara pada 27 maret 2025)

Pemerintah daerah khususnya dinas perikanan di disni berupaya selalu memberikan rasa aman dan juga perlindungan untuk nelayan nelayan kecil ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah sangat serius dalam hal ini dinas perikanan bangka tengah agar nelayan yang ada di bangka tengah dan juga terkhusus di Lubuk Besar dapat perlindungan sosial yang kuat dan menjamin keberlanjutan mata pencaharian mereka. Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun asas jaminan sosial meliputi tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan.

Kedua, bantuan alat tangkap, baik pusat maupun daerah, seringkali menyalurkan bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan untuk berbagai tujuan, antara lain:



- a. Meningkatkan hasil tangkapan, bantuan alat tangkap yang lebih modern dan efisien diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkap nelayan sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka
- b. Meningkatkan produktifitas, alat tangkat yang lebih baik juga dapat membantu nelayan untuk bekerja lebih efisien sehingga dapat menangkap ikan lebih banyak dalam waktu yang sama
- c. Mendukung keberlangsungan usaha, Bantuan alat tangkap membantu nelayan untuk terus menjalankan usaha penangkapan ikan, terutama bagi nelayan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat tangkap yang memadai.
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, Dengan peningkatan hasil tangkapan dan efisiensi kerja, bantuan alat tangkap diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya.

Berikut pernyataan wawancara yang di berikan oleh kabid perikanan tangkap dinas perikanan bapak Triono Aries kurnia menyebut bahwa:

" Bantuan alat tangkap perikanan seperti jaring, mesin laut, kemudian perahu nelayan selalu kami berikan ke nelayan sesuai masalah taupun hambatan yang di hadapi melalui proposal proposal yang di ajukan oleh kelompok nelayan itu sendiri. Dimana kami harapkan bantuan yang telah kami berikan agar dimaksimalkan kemudian dapat dapat membuat masyarakat menjadi lebih inovatif " (Wawancara pada 27 Maret 2025)

Disini terlihat dinas perikanan berusaha mengajak masyarakat nelayan yang telah menerima bantuan agar dapat menggunakan bantuan ini sebaik baiknya karena apabila bantuan di dapatkan tidak di pergunakan sebaik baiknya tidak adak memberikan ke bermanfaat bagi nelayan itu sendiri oleh karena itu perlunya dukungan yang sama di berikan oleh masyarakat nelayan pesisir agar terciptanya keberlanjutan pemberdayaan yang selama ini di upayakan.

Berikut salah satu wawancara penulis dengan nelayan yang berada di dusun Lubuk laut terkait bantuan alat tangkap bapak Dek Rido Antoni mengtkan:

" Dengan adanya bantuan yang di kasih oleh dinas perikanan untuk peralatan melaut bagi kami sangat membantu, meskipun yang menjadi koreksi kami yaitu terkait jumlahnya misalkan kami dalam 1 kelompok nelayan beranggotakan 10 orang tapi bantuan yang ada misalkan mesin tempel itu hanya 2 . Itu bukanya kami tidak bersyukur tapi kami sulit untuk pembagiannya. Dan itupun misalkan kami mengajukan kembali proposal untuk alat yang lainnya sulit karena telah mendapat bagian sebelumnya. " (Wawancara pada 27 Maret 2025).

Dari wawancara diatas dapat kita lihat peran pemerintah khusus nya dinas perikanan telah berupaya memaksimalkan dalam hal ini pemberdayaan untuk nelayan dengan bantuan bantuan yang di butuhkan oleh masyarakat nelayan meskipun terbatas dan juga dalam pembagiannya



belum optimal. Terkait jumlah banyaknya bantuan ini merupakan sudah program ataupun anggaran yang sudah di anggarkan oleh pemerintah.

Ketiga, penyuluhan dan pendampingan. penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan merupakan cara memberikan informasi kepada setiap individu dalam aktivitas penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut. Sedangkan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri dari penyuluh perikanan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan selaku perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan khususnya dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan

Salah satu uapaya dinas perikanan dalam pemberdayaan nelayan adalah melakukan penyuluhan dan bekerja sama dengan pihak pihak terkait. Metode penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan bangka tengah melalui tim penyuluh adalah sistem kunjungan secara langsung di masyarakat nelayan dengan melakukan pendataan dan pendampingan berkaitan dengan kebutuhan nelayan di lubuk besar. Selain itu kegiatan penyuluhan dan pendampingan dibentuk dalam rangka memberikan informasi ke nelayan secara langsung dan melakukan pendampingan terkait urusan-urusan nelayan.

Keempat, kelembagaan nelayan Melalui kelembagaan inilah nelayan dapat mengembangkan diri sebagai nelayan yang baik, memudahkan kelompok untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar. Kelembagaan kelompok perlu diperkuat, dibimbing dan juga didampingi agar kelembagaan kelompok ini nantinya dapat mandiri baik dalam menjalankan usahanya, ataupun dalam mengatasi kesulitan akses permodalan maupun pemasaran. Dalam penyelenggaraan Kelembagaan Nelayan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk. Jika dalam hal Kelembagaan belum terbentuk, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.

Dalam pembentukan kelembagaan nelayan tentunya harus meliputi aspek aspek penting di dalamnya seperti budaya, norma, potensi dan juga kearifan budaya di sekitar. Kelembagaan nelayan dengan pemberdayaan nelayan melalui dukungan kelembagaan dapat berbentuk:

- a) Pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat
- b) Kelompok Nelayan
- c) Kelompok usaha bersama



d) Kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan

Pemerintah bangka tengah sendiri melakukan dukungan terhadap kelembagaan nelayan dengan harapan dapat mendorong peningkatan daya masyarakat dalam membentuk kelompokkelompok nelayan, atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk guna bersama sama mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kualitas hidup dan juga pendapat nelayan.

Pembentukan kelompok nelayan merupakan didasari dari atas tujuan nelayan baik itu untuk mempermudah nelayan dalam pengajuan bantuan ke pemerintah dan dinas perikanan terkait masalah dan juga kendala yang sedang mereka hadapi setelah itu kelembagaan nelayan dalam bentuk kelompok kurang dimaksimalkan untuk dipergunakan menjadi wadah pembelajaran, bertukar informasi bagi para nelayan. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu memberikan perhatian mereka secara khusus mulai dari pembinaan dan pendidikan supaya kelembagaan nelayan menjadi alat untuk pemberdayaan nelayan.

B. Kendala pemerintah dalam proses pemberdayaan nelayan

Kendalah merupakan halangan, rintangan atau pembatasan yang menghalangi pencapaian tujuan, dalam hal ini kendalah bisa di katakan faktor faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan nelayan yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kondisi lain yang membuat tidak berjalannya pemberdayaan dengan semestinya adalah di pengaruhi oleh pola hidup atau kebiasaan nelayan, sumber daya manusia yang belum mumpuni dengan tingkat pendidikan rata rata SD sampai SMP. Hal ini merupakan hambatan dan juga keterbatasan yang ada pada masyarakat nelayan di era kemajuan seperti sekarang ini, yang dimana teknologi serta informasi berjalan dengan sangat pesat. Dengan keterbatasan yang ada pada masyarakat nelayan pemerintah daerah khususnya dinas perikanan juga harus melakukan banyak upaya dan juga usaha harus menyesuaikan program program yang akan di ambil.

Disisi lain juga kemampuan pemerintah dinas perikanan juga berkontribusi memperburuk keadaan adalah keterbatasan dinas perikanan juga membuat lambat nya dalam mengakomodasi kebutuhan nelayan yang jumlahnya ratusan sampai ribuan. Di tambah fakta di lapangan mempunyai karakteristik orang pesisir di tiap wilayah yang sangan beragam baik suku dan juga bahasa yang berbeda, tentunya juga berpengaruh pada karakter tiap individu nelayan.

Seperti wawancara yang di sampaikan oleh bapak kabid perikanan tangkap Triono Aries kurnia menyebut bahwa :

" Dalam proses pemberdayaan kami juga menemui hambatan yang dimana karakteristik masyarakat pesisir di wilayah lubuk besar yang mana di wilayah tersebut Pluralitas tinggi yang mengakibatkan program pemberdayaan seperti



untuk membuat suatu organisasi sangat sulit karena kedaerahan mereka sangat kental. Kemudian lambatnya penyerapan informasi yang oleh nelayan juga di pengaruhi oleh SDM neyan itu sendiri. " (Wawancara pada 27 Maret 2025).

Selain itu juga anggaran merupakan faktor penting tetap atau tidaknya dalam proses pemberdayaan karena anggaran merupakan faktor penggerak terhadap semua kegiatan yang di lakukan oleh elemen pemerintahan. Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan klasik suatu program pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan nelayan. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlanjutan sesuatu program pemberdayaan yang mana selain dana anggaran yang terbatas disisi lain pihak yang mengelola anggaran yakni pemerintah daerah menggunakan anggaran secara tepat dan program yang harus tepat. Kekurangan dana akan menjadi penghambat yang tentunya akan berdampak pada nelayan yang dimana juga akan berdampak pada kemiskinan yang terus berlangsung, seharusnya dana yang di anggarkan bisa di nikmati oleh nelayan.

C. Analisis Penelitian

1. Gambaran umum pemberdayaan masyarakat nelayan di lubuk besar.

Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Lubuk Besar Desa Lubuk Besar merupakan salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Mayoritas masyarakat desa ini bekerja sebagai nelayan tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu tergantung musim dan hasil tangkapan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, Pemerintah Daerah Bangka Tengah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan, seperti bantuan alat tangkap, pelatihan keterampilan, serta pembentukan kelompok usaha nelayan. Namun demikian, tingkat kesejahteraan nelayan di desa ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan tersebut menggunakan teori pemberdayaan dari Edi Suharto.

2. Analisis Teori Pemberdayaan Edi Suharto

Edi Suharto (2005) menyatakan bahwa pemberdayaan memiliki tiga dimensi penting: 1). Akses terhadap sumber daya produktif, 2). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, 3). Peningkatan kapasitas individu dan kolektif. Ketiga dimensi ini akan menjadi kerangka analisis terhadap peran Pemerintah Daerah Bangka Tengah dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Desa Lubuk Besar.

a. Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya

Bentuk Program yang Dilakukan adalah Bantuan alat tangkap dan perahu: Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa jaring, mesin kapal, dan perahu kecil kepada kelompok nelayan. Subsidi BBM nelayan: Program subsidi ini membantu menekan biaya operasional melaut. Menurut Edi Suharto, akses terhadap sumber daya merupakan tahap awal dari proses pemberdayaan. Masyarakat yang sebelumnya termarginalkan diberi akses terhadap faktor-faktor produksi. Meskipun ada upaya pemberian bantuan, namun tidak semua



nelayan memperoleh akses secara merata. Kriteria penentuan penerima bantuan masih belum transparan dan cenderung didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang menjadi Evaluasi Akses terhadap sumber daya memang telah dibuka, namun belum optimal. Pemerintah perlu memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan dalam pendistribusian sumber daya.

b. Partisipasi Aktif Masyarakat

Bentuk Keterlibatan Masyarakat dapat di lihat pada Musyawarah Desa: Nelayan diundang dalam forum Musrenbangdes, namun peran mereka masih sebatas sebagai pendengar. Keterlibatan dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama) Beberapa nelayan tergabung, tetapi peran aktif hanya dilakukan oleh pengurus inti. Edi Suharto menekankan bahwa pemberdayaan harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek. Temuan lapangan menunjukkan, Keterlibatan masyarakat nelayan dalam pengambilan keputusan masih rendah. Banyak dari mereka yang merasa "tidak punya suara" Hal ini menunjukkan rendahnya kapasitas kritis dan kemandirian politik nelayan dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Evaluasi, Pemerintah daerah perlu memperkuat budaya partisipatif dengan cara: Mengadakan forum dialog yang terbuka, Memberikan edukasi kepada nelayan tentang hak dan kewajiban mereka dalam perencanaan pembangunan desa.

c. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building)

Program yang Dilaksanakan Pelatihan pengolahan hasil laut: Diadakan pelatihan membuat produk olahan seperti ikan asin, kerupuk ikan. Pelatihan kewirausahaan: Masih bersifat insidental dan belum menyentuh aspek manajemen usaha secara komprehensif. Pendampingan oleh penyuluh perikanan: Intensitas pendampingan sangat minim, terbatas tenaga dan anggaran. Capacity building merupakan inti dari pemberdayaan menurut Edi Suharto. Tanpa penguatan kapasitas, masyarakat akan terus tergantung pada bantuan. Temuan lapangan menunjukkan Meskipun ada pelatihan, belum terdapat sistem pelatihan berkelanjutan. Banyak nelayan yang kembali ke pola lama karena tidak ada pendampingan jangka panjang. Evaluasi, Pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan yang: Terstruktur dan berkelanjutan, Menggunakan pendekatan berbasis lokal (local knowledge), Melibatkan fasilitator yang mampu membangun hubungan sosial dengan masyarakat.

3. Hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Rendahnya pendidikan formal, pluralisme tinggi dan nelayan Ketergantungan terhadap pihak luar, Kurangnya koordinasi antarinstansi Minimnya evaluasi dan pemantauan program dan juga anggaran.

4. Strategi Perbaikan Berdasarkan Teori Edi Suharto

Transformasi dari pendekatan karitatif ke partisipatif Fokus pada penguatan kelembagaan lokal. Transparansi dan akuntabilitas dalam program pemberdayaan Sosialisasi kriteria penerima bantuan. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Pelatihan tidak hanya teknis, tapi juga manajerial dan digital.

5. Kesimpulan Analisis

Peran Pemerintah Daerah Bangka Tengah dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Desa Lubuk Besar sudah menunjukkan arah yang benar, namun masih menghadapi sejumlah



kendala struktural dan kultural. Berdasarkan teori Edi Suharto, pemberdayaan akan berhasil bila: Akses terhadap sumber daya terbuka secara adil, Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, Terdapat peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dimensi akses terhadap sumber daya, Pemerintah Daerah bangka tengah yakni dinas perikanan daerah bangka tengah dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di desa lubuk besar, telah melakukan berbagai upaya seperti meberikan bantuan berupa alat tangkap, mesin kapal, perahu kecil, serta subsidi BBM kepada kelompok nelayan. Program ini bertujuan untuk membuka akses masyarakat terhadap faktor produksi yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, akses tersebut belum dinikmati secara merata oleh seluruh nelayan.
2. Dimensi Partisipasi, Partisipasi masyarakat nelayan dalam forum perencanaan desa, seperti Musrenbangdes, masih sebatas formalitas. Rendahnya kapasitas kritis dan kemandirian politik nelayan menjadi tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna dan sejati.
3. Dimensi peningkatan kapasitas, program pelatihan dan kewirausahaan telah di upayakan namun masih belum menyentuh kebutuhan strategis nelayan secara menyeluruh minimnya pendampingan membuat dampak pelatihan tidak berkelanjutan Banyak nelayan kembali ke pola lama karena tidak ada sistem penguatan kapasitas yang terstruktur dan berkesinambungan.

Saran

1. Pemerintah daerah harus secara serius memberikan perhatian kepada masyarakat khususnya masyarakat nelayan pesisir dengan lebih memperhatikan terkait kendala yang sedang di hadapi oleh nelayan dan juga meningkatkan kegiatan pemberdayaan melalui pendidikan, penyuluhan, pendampingan dan sarana prasarana serta juga kelembagaan dan mitra udahan yang tentunya akan berdampak positif pada kesejahteraan nelayan pesisir. Menyelenggarakan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan pendekatan lokal serta pendampingan intensif dari tenaga penyuluh
2. Pemerintah daerah bersama stakeholder harusnya bersinergi dalam membantu membangun dalam pemberdayaan masyarakat nelayan agar membantu perekonomiannya di wilayah desa lubuk besar Selain Penting memberikan pemahaman pada nelayan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, kemudian melakukan evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nelayan secara nyata.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, zainal. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Pantai Blanakan kabupaten Subang*.
- Afni, Nur dan Ahmad. 2022. *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Nelayan (Kelompok Nelayan) Di Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*. Vol (3)3
- Amri, Muhibbustibri. 2022. *Analisis Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten aceh Selatan*
- Fatmawati dkk. 2020. *Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Journal of Public Policy and Management. Vol (1)1
- Hariyanto, Slamet. 2014. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*. Vol (2), No (1)
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Prenada Media Group
- Haryono. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Melalui Koperasi Nelayan dan e commerce*. Jurnal Saintek Maritim. Vol (17) no (1)
- Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*. Kementrian Hukum dan HAM. Jakartas
- Irawan, Andri dan Laurensia Tanzil. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial. Vol. 9, No. 2
- Kaswandi. 2017. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar*
- Maulia, Tria dkk. 2022. *Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Nelayan Di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Berdagai*. Journal Of Laguna Geography. Volume (1), No (2)
- Nilasari, Dias. 2017. *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2013. *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Kota Batam Melalui Pemberdayaan Masyarakat*
- Ramdayanti, Elvira dkk. 2021. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol (VI)2
- Riza, M Syawalun dkk. 2023. *Analisis Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Tanjungbalai*. Jurnal Cendikia Ilmiah. Vol (2), No (2)
- Sapriadi. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar*
- Sari, Titing Purnama. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Guna Meningkatkan Ekonomi Di Dusun Lauwo Pantai Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*
- Subakti, Ramlan. 2006. *Memahami ilmu politik*, PT gramedia widiasarana indonesia



- Sudarsono, Juwono.1982. *pembangunan politik dan perubahan politik*. Penerbit PT Gramedia Jakarta
- Sukarna,1990. *Pembangunan politik*. penerbit mandar maju bandung
- Sumandiyar, Adi dkk. 2023. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Kecamatan Marusu Kabupaten Maros*. Vol (6)2. Hal 194-200
- Susilawati dan Putri Sonia. 2022. *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Jurnal Syntax Administrasi. Vol. 3, No. 7
- Tanjung, ardiansyah. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Melayan Di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli*. Vol (13), no (1)
- Taufik. 2013. *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume (6), No (1)
- Wattimena, Zarita Kaulita R dkk. 2022. *Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Impliksinya Terhadap Ketahanan ekonomi Keluarga Nelayan (Studi Pada Kampung Nelayan Di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku)*. Volume (28), 1. Hal 51-81
- Zulfani. 2012. *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kecamatn Polewali Kabupaten Polewali Mandar*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol (5), No (2)